

KUMPULAN

CERITA PERUBAHAN **KOMPAK**

TATA KELOLA

KECAMATAN DAN DESA



Daftar Isi



1
Musrenbang Inklusif Aikmel:
Wadah Aspirasi Kelompok Rentan



3
Kabupaten Pacitan Aktif
Mempromosikan Pembangunan
Desa yang Responsif Gender



5
Tradisi Selapanan Mendukung
Pelayanan Dasar yang Lebih Baik



7
PRG Membawa Warga Aceh
Sadar Dokumen Kependudukan



11
Melayani Kebutuhan Dokumen
Kependudukan Warga Bonto Tirto
Lewat Posko Aspirasi



14
Asa dari PTPD untuk Desa



17
Klinik *Gampong*: Memberdayakan
Aparatur *Gampong*,
Memberdayakan Masyarakat



20
SEPAKAT: Menyediakan Data Akurat
untuk Program Penanggulangan
Kemiskinan yang Tepat Sasaran



22
KLIK PEKKA Trenggalek dan Ikhtiar
Penuh Layani Masyarakat



25
Klinik Desa Membangun, Solusi
inovatif Perbaikan Tata Kelola Desa



29
Membangun Desa Inklusif
Berkeadilan



31
Membantu Pemerintah
Desa Merencanakan dan
Menyelenggarakan Layanan Dasar



33
Memotong Birokrasi,
Meningkatkan Kualitas Layanan



35
Mendorong Kepemimpinan
Perempuan Lewat
Akademi Paradigma



37
Penghargaan Inovasi Percepatan
Layanan: Kompetisi Kecamatan
Untuk Kemajuan Layanan
Administrasi Kependudukan

Musrenbang Inklusif Aikmel: Wadah Aspirasi Kelompok Rentan



▲ Diskusi kelompok dalam Musrenbang Khusus menjangkau aspirasi dari kelompok masyarakat rentan.

Usia Mardiyah, warga Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur memang tak lagi muda yaitu 73 tahun, namun semangatnya selalu tinggi dan pantang menyerah. Semangatnya itu ditunjukkan ketika menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Khusus untuk perempuan dan kelompok rentan di kantor kecamatan pada Februari 2021 lalu.*

Mardiyah yang hadir mewakili kelompok lanjut usia itu, tanpa sungkan dan penuh semangat menyampaikan berbagai kegelisahan mewakili desanya. "Ini saatnya kita berbicara. Karena sebelumnya, kita tidak pernah didengar apalagi ikut dalam kegiatan seperti ini," ujar perempuan itu.

Ini kali kedua, Mardiyah hadir dan aktif mengikuti Musrenbang Khusus. Pada musrenbang kali ini, perwakilan masyarakat yang hadir mengusulkan beberapa kegiatan seperti perbaikan sarana dan pra sarana kesehatan, sampai bantuan usaha untuk warga miskin seperti Mardiyah. "Alhamdulillah, beberapa usulan kami tahun lalu sudah terlaksana. Yang belum terlaksana, akan kita usulkan lagi tahun ini dan tahun depan," sebut Mardiyah.

Sejak 2020, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dengan dukungan KOMPAK berupaya mewujudkan pembangunan yang inklusif melalui pelibatan kelompok perempuan, masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaan pembangunan. Ikhtiar ini dilakukan mulai dengan menerbitkan Panduan Pelaksanaan Musrenbang Khusus Kabupaten, sampai penguatan

* bukan nama sebenarnya

tim kecamatan agar dapat memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang partisipatif, inklusif, berorientasi pada perbaikan layanan dasar, dan selaras dengan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kabupaten.

Upaya ini juga didukung dengan terbitnya Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender. Peraturan ini menyediakan dasar regulasi dan panduan yang diperlukan untuk mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan inklusif. "Salah satunya melalui Musrenbang Khusus agar aspirasi masyarakat rentan bisa didengar. Karena sebelumnya mereka sungkan menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka," ujar Edy Ilham, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim.

Namun tambah Edy, usulan dalam Musrenbang Khusus harus selaras dengan program prioritas pemerintah daerah supaya dapat diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa. "Jadi Musrenbang Khusus ini juga berfungsi mempertajam usulan dari masyarakat, agar sejalan dengan prioritas pemerintah, baik pusat maupun daerah," imbuhnya.



▲ Diskusi kelompok dalam Musrenbang Khusus di Kecamatan Aikmel, Lombok Timur sebelum pandemi.

Sejak 2020, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dengan dukungan KOMPAK berupaya mewujudkan pembangunan yang inklusif melalui pelibatan kelompok perempuan, masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaan pembangunan. ■

Untuk itu, pada setiap Musrenbang Khusus, Bappeda akan terlebih dahulu memaparkan program pembangunan prioritas, sehingga ketika diskusi dengan kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan rumah tangga miskin dilaksanakan, usulan mereka bisa selaras dengan kebutuhan dan fokus pembangunan pemerintah daerah.

Meskipun belum semua usulan Musrenbang Khusus ini terealisasi, namun pelibatan kelompok perempuan dalam proses perencanaan pembangunan membawa perubahan di Desa Toya. "Banyak perubahan terjadi setelah kami dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan desa. Kami bisa terlibat dalam pendataan warga penerima BLT-Dana Desa. Sekarang pun sudah ada perempuan yang menjadi anggota BPD. Sebelumnya tidak ada. Kami senang, akhirnya kami didengarkan," pungkas Mardiyah.

Kabupaten Pacitan Aktif Mempromosikan Pembangunan Desa yang Responsif Gender



Kaum perempuan kini sudah ikut berperan aktif dalam program pembangunan desa di Kabupaten Pacitan. ▲

Kabupaten Pacitan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memperlihatkan peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam penyusunan rencana aksi daerahnya. Sejak pemerintah Kabupaten Pacitan - dengan dukungan KOMPAK - menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019, pemerintah desa mendapatkan kewenangan untuk menyusun rencana aksi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Desa yang responsif dan inklusif. Peraturan tersebut juga mendorong pemerintah desa mewujudkan partisipasi aktif seluruh warga termasuk kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, warga miskin, dan lansia.

“Dulu, tingkat partisipasi kaum perempuan di Kabupaten Pacitan dalam forum perencanaan pembangunan daerah sangat rendah. Namun sejak diterbitkannya Peraturan Bupati Pacitan yang mengarah pada pengarusutamaan gender, hampir setiap kecamatan dan desa mulai mengikutsertakan perempuan dalam musyawarah pembangunan,” ungkap Wahyu Pribadi, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Kelembagaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabupaten Pacitan.

Sampai saat ini seluruh 166 desa yang tersebar di 12 kecamatan telah melaksanakan PUG. Salah satunya Desa Pucangombo di Kecamatan Tegalombo. Menurut Wahyu Pribadi, Pucangombo adalah salah satu desa yang cukup adaptif terhadap pelaksanaan kegiatan responsif gender. Kaum perempuan dan penyandang disabilitas kini sudah ikut berperan aktif dalam program pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.



Sarmidi, Kepala Desa Pucangombo, mengungkapkan bahwa perangkat desa mendorong perempuan dan kelompok rentan agar terlibat aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa. Pemerintah desa akan mengakomodasi usulan mereka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Dengan demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) juga disesuaikan sehingga menjadi responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Agar upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang inklusif ini semakin berkembang, pada 2019, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama KOMPAK menginisiasi program musrenbang inklusif di Kabupaten Pacitan. Inisiatif ini kemudian menjadi model penyampaian aspirasi dan

keterlibatan kelompok rentan dalam perencanaan dan penganggaran desa hingga kabupaten. Musrenbang inklusif di Kabupaten Pacitan ternyata mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Hasilnya, sebanyak 90% usulan kelompok rentan, terakomodasi dalam APB Desa.

Dalam APB Desa 2021 misalnya, Desa Pucangombo menambah anggaran pelaksanaan pembangunan desa untuk kelompok rentan sebanyak Rp 310 juta atau naik sekitar 35% dari anggaran tahun 2020. Penambahan anggaran yang cukup signifikan ini disediakan untuk mendukung pendidikan masyarakat miskin, kesehatan anak dan lansia, serta rehabilitasi rumah tak layak huni. Sementara itu, terkait pemberdayaan masyarakat desa, telah disediakan alokasi dana sebesar Rp 70 juta untuk pelatihan bagi penyandang disabilitas.

Selain berdampak pada program pembangunan desa, kegiatan PUG melahirkan perempuan-perempuan pemimpin yang memiliki posisi penting di organisasi desa, seperti perangkat desa, Karang Taruna, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) maupun Badan Usaha milik Desa (BUMDES).

“Melalui program pembangunan yang inklusif, masyarakat Desa Pucangombo senantiasa mendapat perlakuan adil dan setara, serta ikut terlibat dan merasakan manfaat pembangunan desa, bukan hanya terkait fasilitas sarana dan prasana, tetapi juga kebutuhan aktualisasi masyarakatnya, khususnya bagi kelompok rentan,” tutup Sarmidi.

Tradisi Selapanan Mendukung Pelayanan Dasar yang Lebih Baik



Anggota Kelompok Selapanan aktif melakukan pendataan terhadap warga yang membutuhkan bantuan. Salah satunya mendata ▲ anak-anak putus sekolah, agar bisa bersekolah lagi. (Foto diambil sebelum pandemi COVID-19).

Di Tanah Jawa, Selapanan adalah tradisi turun temurun yang diselenggarakan untuk menyambut kehadiran bayi di usianya yang ke-35 hari. Tradisi ini dimaknai sebagai upaya untuk mencari keselamatan sekaligus wadah sosialisasi masyarakat dengan lingkungannya. Namun di Desa Cipetung, Wanatirta, dan Kedungoleng, Kecamatan Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah, Selapanan bukan tradisi biasa.

“Kita kumpul sebulan sekali, membahas masalah-masalah yang dihadapi warga. Lalu nanti masalah itu kita sampaikan ke desa atau pihak-pihak terkait. Nanti setiap tiga bulan sekali, kami kumpul lagi dengan anggota kelompok selapanan desa lain. Untuk diskusi dan berbagi informasi,” jelas Elli Susanti (27), warga Desa Wanatirta ketika berkumpul bersama rekan-rekannya sesama anggota Selapanan.

Perubahan fungsi Selapanan di tiga desa ini terjadi sebagai respon kehadiran Dana Desa yang dikururkan pemerintah sejak tahun 2015. Di tahun 2017, Kelompok Selapanan mendapat dampingan dari Forum Masyarakat Sipil (Formasi) dan *the Asia Foundation* (TAF) dengan dukungan KOMPAK, untuk memastikan dana tersebut benar-benar memberi manfaat bagi kemajuan desa.

Selama pendampingan KOMPAK, Kelompok Selapanan mendapat pengetahuan tentang perencanaan desa yang partisipatif dan mendukung layanan dasar lewat pelatihan perencanaan pembangunan desa dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Mereka juga belajar melakukan penilaian partisipatif terhadap pelayanan posyandu maupun puskesmas, dan membantu pemerintah desa mengumpulkan persyaratan untuk mendapatkan identitas hukum khususnya bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas. "Fokus kegiatan kami memang pada tiga layanan dasar yaitu kesehatan, pendidikan dan dokumen kependudukan," ujar Elli.

Hasilnya, sejak tahun 2018, perwakilan Kelompok Selapanan di Cipetung, Wanatirta, dan Kedungoleng dilibatkan sebagai tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dikenal dengan sebutan Tim Sebelas (11). Sebagai bagian tim penyusun RKP Desa, perwakilan Kelompok Selapanan berkontribusi mewujudkan program pemerintah desa yang responsif dan inklusif. Salah satunya adalah dengan memastikan penjangkauan layanan adminduk yang lebih luas.

Selama kurun 2018-2020, Kelompok Selapanan membantu lebih dari 500 anak usia 0-18 tahun mendapatkan akta kelahiran mereka. "Alhamdulillah, sekarang saya bisa mengurus akta kelahiran anak saya dengan mudah, cepat dan tanpa biaya," ujar Darniah (27), warga Desa Cipetung.

Sebagai bagian tim penyusun RKP Desa, perwakilan Kelompok Selapanan berkontribusi mewujudkan program pemerintah desa yang responsif dan inklusif. Salah satunya adalah dengan memastikan penjangkauan layanan adminduk yang lebih luas.

Nunung Widyastuti, Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes berharap, keberadaan Selapanan terus dipertahankan untuk menjangkau masyarakat miskin yang tinggal di pelosok mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. "Kelompok Selapanan membantu kami meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran, karena kami tidak punya petugas yang berada di desa untuk menjangkau masyarakat," ujar Nunung.



Darniah, warga Desa Cipetung yang berhasil mendapatkan akta kelahiran secara cuma-cuma berkat bantuan dari Kelompok Selapanan.

Di masa pandemi COVID-19, Kelompok Selapanan tetap melakukan pendataan dan pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Identitas Anak (KIA) dengan mengikuti protokol kesehatan. "Kami juga terlibat dalam upaya penanggulangan COVID-19, melalui anggota kami yang bergabung dengan Satgas COVID di desa mereka," pungkas Yatno (41), salah satu anggota Selapanan dari Desa Cipetung.

Selama pendampingan KOMPAK, Kelompok Selapanan mendapat pengetahuan tentang perencanaan desa yang partisipatif dan mendukung layanan dasar lewat pelatihan perencanaan pembangunan desa dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

PRG Membawa Warga Aceh Sadar Dokumen Kependudukan



PRG memfasilitasi warga yang ingin mengurus dokumen kependudukan, termasuk menyediakan layanan jemput bola ke rumah warga miskin dan rentan (foto diambil sebelum pandemi). ▲

Perjuangan Petugas Registrasi Gampong (PRG) di Bireuen, Aceh, turun ke lapangan mengedukasi masyarakat membuahkan hasil. Berkat KOMPAK, Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI) dan Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) ini, warga Bireuen kini sudah paham pentingnya dokumen kependudukan. Mereka juga dapat menikmati berbagai program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kelengkapan data juga dapat digunakan untuk menyusun anggaran gampong dengan lebih tepat sasaran.

“Maaf, nggak ada orang di rumah,” demikian jawaban dari balik pintu rumah yang sering diterima oleh Uswatun Khairat saat menjalankan pekerjaannya sebagai Petugas Registrasi Gampong (PRG) di Gampong Blang Kuta Dua Meunasah, Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen. Padahal, perempuan yang mulai menjadi PRG sejak tahun 2017 ini, hanya ingin membantu warga untuk mengurus dokumen kependudukan.

Saat itu, warga memang belum memahami manfaat dokumen kependudukan. "Orang gampong yang sudah punya Kartu Keluarga (KK), ada yang menggunakannya untuk alas gorengan karena dianggap tidak penting," tutur Uswatun. Selain itu, data dalam dokumen yang dimiliki juga belum tentu akurat. "Bisa berbeda nama anggota keluarga di KK yang dimiliki dengan yang sebenarnya," Uswatun memberi contoh.

Padahal, dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), KK dan akta kelahiran merupakan basis identifikasi penduduk untuk dapat dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang kemudian menjadi acuan daftar penerima bantuan dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Akibatnya, pembagian bantuan seringkali tidak tepat sasaran. "Jika ada yang bertanya tentang proses pembagian PKH, mereka hanya diberi penjelasan bahwa semua diatur dari pusat," jelas Uswatun.

Itulah sebabnya Uswatun menyambut baik ketika Gampong Blang Kuta Dua Meunasah menjadi satu dari enam gampong di Kecamatan Simpang Mamplam yang menjadi gampong percontohan program Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) melalui fasilitator Adminduk gampong yang di



PRG juga melakukan sosialisasi kepada warga tentang pentingnya memiliki dokumen identitas hukum. ▲

Aceh dikenal sebagai PRG di tahun 2017. PRG adalah buah kerja sama PUSKAPA UI, PKPM beserta KOMPAK, program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia.

PRG bertugas membantu warga melengkapi dokumen kependudukan dengan mengumpulkan persyaratan, menjemput bahkan mengantarkan dokumen ke rumah warga yang memerlukan. Dengan dokumen kependudukan yang lengkap, warga dapat mengakses pelayanan dasar dan program lainnya yang disediakan pemerintah, sehingga dapat mendorong penanggulangan kemiskinan.

Keuchik (Kepala Gampong) Gampong Blang Kuta Muesanah, Fakhrizal memilih Uswatun sebagai PRG setelah melihat kegigihan dan kesediaannya membantu program gampong. Awalnya, Uswatun dan orang tuanya sempat ragu karena

saat itu Uswatun tengah menyelesaikan pendidikan sarjana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Namun melihat kondisi masyarakat yang tidak paham pentingnya dokumen kependudukan, Uswatun akhirnya menyanggupi.

Perempuan yang saat itu berusia 25 tahun ini segera turun ke lapangan. Ia berkunjung dari pintu ke pintu meminta warga memperlihatkan dokumen kependudukan mereka untuk verifikasi kesamaan data, sekaligus menawarkan jika mereka belum memiliki dokumen kependudukan yang lengkap.

Ia berjalan kaki hingga 2,5 jam lamanya untuk berkeliling kampung maupun membantu gampong-gampong lain di Kecamatan Simpang Mamplam setiap pagi dan sore hari. Minimal ia harus datang tiga kali ke rumah warga, di mana dalam setiap kunjungan ia harus menghabiskan waktu satu jam

untuk memberikan penjelasan. Uswatun menyelengi kegiatan dengan mengajar TK setiap jam dua siang, serta mengajar pesantren di malam hari.

“Saya sering diusir karena kebiasaan warga miskin sering kena tipu oleh oknum-oknum tertentu dengan mengiming-imingi bantuan sehingga warga tidak mudah memberikan dokumen kependudukan. Kadang mereka setuju untuk memperlihatkan dokumen yang dimiliki, tapi saya harus memberi mereka sejumlah uang,” cerita Uswatun.

Pernah dalam satu kunjungan ke rumah salah seorang warga, Uswatun menemukan bahwa nama anak dalam akta kelahiran yang dimiliki berbeda dengan KK serta ijazah kelulusan SD. Namun Uswatun malah menerima bentakan. “Saya sudah lama hidup di sini tidak ada yang bilang data saya salah, mengapa kamu datang-datang bilang saya salah?” tutur Uswatun menirukan.

Namun hal itu tidak menyurutkan semangat Uswatun untuk memberikan pelayanan. “Semakin dibentak, semakin saya menjadi lembut dan tetap bujuk untuk menjelaskan pentingnya sinkronisasi data,” ujar Uswatun tentang taktiknya dalam menjalankan tugas.

Ia pun memaparkan bahwa akta kelahiran yang salah tersebut perlu diperbaiki karena dapat menimbulkan kesulitan di masa datang ketika

anak masuk SMP atau perlu menerima bantuan. “Ibu itu malah meminta bantuan ke saya sebelum memperbaiki akta,” tuturnya. Uswatun kembali menjelaskan bahwa bantuan itu bukan datang darinya, melainkan dari pemerintah yang dapat memberikan bantuan berdasarkan data kependudukan yang tercatat.

Meskipun masih tetap menerima penolakan, Uswatun tetap menawarkan bantuan dengan memberi nomor kontakannya dan menginfokan bahwa ia bisa ditemui di kantor *keuchik* setiap Jumat dan Minggu.

“Jam 12 malam di hari yang sama, tiba-tiba dia datang mengetuk pintu, mendatangi rumah saya, minta tolong untuk diurus pembetulan akta lahir anaknya,” tutur Uswatun sambil tertawa. Rupanya setelah kunjungan Uswatun, warga yang masih merupakan kerabat Uswatun tersebut mencari tahu perihal persyaratan masuk SMP dan menemukan bahwa ijazah dan akta kelahiran yang sinkron diperlukan untuk pendaftaran.

Kini, seluruh warga Gampong Blang Kuta Dua Meusanah sudah paham pentingnya dokumen kependudukan. Mereka jalan sendiri ke kantor desa, mengakses berkas dibantu PRG. ■

Perlahan, masyarakat mulai menerima keberadaan PRG. “Alhamdulillah, setelah setahun penuh, mereka mengerti,” tutur perempuan yang kini tengah menantikan anak pertamanya itu. Masyarakat juga mulai merasakan manfaat kelengkapan dokumen seperti dapat mengakses PKH. “Jika data sinkron, maka dapatlah bantuan,” Uswatun menjelaskan pada warga.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Gampong pada tahun 2020 juga semakin meningkatkan antusiasme warga mengurus kelengkapan dokumen. “Lebih wow lagi! Jika pada tahun 2017 ada yang menolak diurus KK-nya, kini mereka mau dibantu agar punya KK baru,” cerita Uswatun.

Kini, seluruh warga Gampong Blang Kuta Dua Meusanah sudah paham pentingnya dokumen kependudukan. “Orang sudah mengerti semua, kalau sudah umur 17 tahun wajib punya KTP. Mereka jalan sendiri ke kantor gampong, mengakses berkas dibantu PRG,” tutur Kasmiyati Amirin, salah seorang warga Gampong Blang Kuta Dua Meunasah. Tiga anaknya yang sudah menginjak usia SMA telah memiliki KTP.

Proses mengurus dokumen pun menjadi lebih mudah. “Dulu, masyarakat harus bolak-balik ke kantor camat atau ke kabupaten untuk bertanya persyaratan dokumen, melengkapi persyaratan, dan memperbaiki dokumen yang salah,” tutur

Fakhrizal,, “Jarak gampong dan kabupaten memakan waktu kurang lebih satu jam perjalanan dan prosesnya bisa seminggu atau lebih lama,” tambahnya lagi.

Akibatnya, banyak warga yang memilih menggunakan jasa calo. “Ada calo yang hanya meminta nama atau membantu mengisikan formulir. Akibat proses yang alakadarnya ini, banyak data kependudukan seperti nama dan tempat tanggal lahir yang keliru karena calo hanya mengejar dokumen selesai,” tutur Fakhrizal.

Sedangkan kini, masyarakat tinggal melengkapi formulir dan dokumen persyaratan yang diberikan PRG. “PRG-lah yang kemudian membawa dokumen aplikasi tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten, biasanya 2 kali dalam seminggu,” jelas Fakhrizal. Ketika dokumen sudah jadi, PRG akan mengantar dokumen tersebut ke masyarakat atau menelpon masyarakat untuk mengambil di kantor gampong.

“Dokumen selesai lebih cepat dan tidak butuh biaya,” Kasmiyati membandingkan proses yang dilaluinya dalam mengurus KTP melalui PRG dan lewat calo, yang biasanya merupakan orang dari luar gampong yang menawarkan jasa mengurus dokumen. “Perlu dokumen seminggu harus selesai dan dikumpulkan di sekolah, PRG cepat siap,” ujar perempuan berusia 48 tahun ini



Wajah bahagia warga Gampong Blang Kuta Dua Meunasah yang terbantu dengan kehadiran PRG di Kabupaten Bireuen (foto diambil sebelum pandemi).

mencontohkan. Kini, Kasmiyati tidak pernah lagi menjumpai para calo itu di gampongnya.

Data kependudukan yang akurat juga dapat digunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APB Gampong). “Pengalokasian anggaran untuk pemberdayaan dan program-program sosial seperti untuk balita, posyandu, ibu hamil, ditetapkan dari data yang dikumpulkan di level gampong sehingga program tepat sasaran dan efektif,” tutur Fakhrizal.

Hingga pertengahan 2021, PRG telah diadopsi oleh 609 gampong di 8 kecamatan di Bireuen. Kehadiran Perbup 14/2018 juga menjamin keberlangsungan program dengan memberikan payung hukum untuk pelibatan PRG sekaligus memastikan ketersediaan anggarannya.

Dengan dukungan dari dana gampong, Camat Simpang Mamplam, Mursyidi, menyampaikan angka kepemilikan dokumen kependudukan di wilayahnya meningkat sehingga berkontribusi terhadap peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bireuen. “Cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Bireuen meningkat dari 45% di tahun 2017, meningkat menjadi 89% di tahun 2021 atau melampaui target nasional,” jelas Mursyidi.

Uswatun pun berharap bahwa program PRG terus berkembang dan meluas cakupannya karena dapat menjawab kesulitan masyarakat Aceh dalam pengurusan Adminduk. “Semoga lahir PRG yang semakin luar biasa, yang terus berjuang, hingga seluruh Aceh menjadi sadar pentingnya dokumen kependudukan,” tutup Uswatun.

Melayani Kebutuhan Dokumen Kependudukan Warga Bonto Tirto Lewat Posko Aspirasi



Pembangunan lingkungan Desa Bonto Tirto adalah buah hasil perencanaan yang berbasis data melalui Posko Aspirasi (foto diambil sebelum pandemi). ▲

Warga Bonto Tirto, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan kini punya tempat mengadu. BPD bersama Yasmib Sulawesi, Fitra dan KOMPAK mengadakan Posko Aspirasi, di mana warga dapat menyampaikan aspirasi serta keluhan mereka. Aspirasi warga juga akan menjadi dasar rancangan APB Desa, memastikan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Warga juga dapat lewat Posko Aspirasi

Sehari-harinya, Daeng Baji tinggal sebatang kara di rumahnya di Dusun Kasiping, Desa Bonto Tiro, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Suaminya telah meninggal sedangkan kedua anaknya sudah memiliki keluarga masing-masing. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, lansia berusia 60 tahun ini hanya mengandalkan pemberian kedua anaknya yang bekerja sebagai pegawai honorer di kantor desa.

Daeng Baji sebenarnya berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun penulisan nama dalam Kartu Keluarga (KK)-nya salah. Padahal KK adalah salah satu syarat pencatatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), acuan daftar penerima bantuan dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Itulah sebabnya Daeng Baji segera menyampaikan aspirasinya untuk minta dibantu mengurus KK ketika mendengar akan adanya Posko Aspirasi Bonto Tirto dari anaknya, Siti Syamsiah dan Ketua Forum BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Perempuan - Perkasa (Perempuan Kawal Desa) Kabupaten Bantaeng, Ibu Hartuti.

Seperti warga Dusun Kasiping lainnya, Daeng Hawa, juga menyambut adanya Posko Aspirasi. Setiap kali ia berobat ke fasilitas kesehatan atau layanan lainnya, perempuan berusia 55 tahun ini selalu ditanyai tentang nomor KK ataupun Nomor Induk Kependudukan (NIK). Begitu mendengar tentang Posko Aspirasi dari Ibu Hartuti, Daeng Hawa pun segera menyampaikan keinginan mengurus akta kelahiran suaminya, Haerudin yang telah berusia 56 tahun.

Ide Posko Aspirasi ini merupakan bagian dari program untuk mewujudkan “Desa Melek Anggaran” untuk membangun desa yang responsif gender dan inklusif. ■

Daeng Baji dan Daeng Hawa adalah dua dari 386 warga Desa Bonto Tirto yang memanfaatkan Posko Aspirasi untuk menyelesaikan permasalahan identitas kependudukan yang mereka hadapi.

Posko Aspirasi Bonto Tirto merupakan upaya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bonto Tirto untuk menjalankan fungsinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa. Dengan adanya Posko Aspirasi, BPD dapat semakin melibatkan kelompok rentan dalam proses perencanaan dan penganggaran desa.

Ide Posko Aspirasi ini merupakan bagian dari program Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) dan Pengembangan Posko Pengaduan dan Aspirasi untuk mewujudkan “Desa Melek Anggaran” untuk membangun desa yang responsif gender dan inklusif, yang dilaksanakan oleh Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMIB) Sulawesi bekerja sama dengan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dan KOMPAK.

Sekretaris BPD Bonto Tirto, Kakhfi menjelaskan bahwa ada banyak masalah yang dihadapi warga sehingga diperlukan satu inisiatif solusi. “Posko aspirasi dapat menampung dan mendapatkan informasi aspirasi langsung yang menyangkut kebutuhan dasar warga desa,” ujar Kakhfi.

Anggota BPD, para kepala dusun, Karang Taruna, tokoh perempuan dan masyarakat pun berkumpul untuk mempersiapkan Posko Aspirasi ini. Selama tiga hari mereka membahas identifikasi masalah dalam masyarakat. Mereka

juga menerima pembekalan dan penguatan kapasitas dari KOMPAK sebelum melaksanakan tugas.

Pada 26-30 November 2019, Posko Aspirasi berjalan, dengan fokus akan permasalahan administrasi kependudukan. Wargapun menyambut dengan antusias. Setiap harinya, satu hingga 10 orang datang untuk menyampaikan aspirasinya.

Setelah Posko Aspirasi ditutup, Pemerintah Desa Bonto Tirto menggelar musyawarah penyelesaian pada tanggal 10 Desember 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh PKK, BPD, pengurus Posko Aspirasi, Karang Taruna, KPI, kepala dusun dan bertujuan memastikan usulan masyarakat mendapatkan respon positif dari pemerintah desa.

Relawan kemudian mengumpulkan data atau dokumen pendukung melalui kunjungan rumah. Mereka lalu menyampaikan ke sekretaris desa untuk dibuatkan pengantar berdasarkan kebutuhan dokumen masyarakat. Pemerintah desa kemudian menugaskan Koordinator Kependudukan dan Catatan Sipil (Koordukcapil) desa untuk mengurus ke Dinas Dukcapil.

“Relawan Posko datang mengambil KK lama dan membuat pengantar KK ke kepala desa. Kemudian relawan membawa ke kantor Capil (Catatan Sipil) untuk diproses dan segera setelah dokumen tersebut (rampung), diantarkan



Melalui Posko Aspirasi, BPD Desa Bonto Tiro menampung aspirasi masyarakat, termasuk usulan dari kelompok miskin dan rentan ▲

langsung ke rumah saya,” tutur Daeng Baji tentang prosesnya mengurus KK lewat Posko Aspirasi.

Kepala Desa Bonto Tirto, Arman memenuhi targetnya untuk menyelesaikan masalah adminduk masyarakat dalam waktu 1 minggu. Bahkan, Daeng Hawa dapat menerima akta kelahiran suaminya hanya dalam waktu satu hari setelah menyerahkan fotokopi KK dan kelengkapan dokumen kepada Ibu Desa, panggilan akrab Ibu Hartuti.

Dengan lengkapnya dokumen warga dapat menikmati berbagai fasilitas pelayanan serta bantuan pemerintah. “Kalau pergi ke puskesmas, rumah sakit atau ambil uang di bank, dokumen tersebut dicari. Karena sudah punya, maka dengan mudah terlayani,” ujar Daeng Hawa.

“Ketika mendapat bantuan, baik itu dari pemerintah desa, kabupaten, dan pusat, dengan mudah menerimanya karena memiliki dokumen tersebut,” tutur Daeng Baji yang telah

menerima bantuan.

“Aspirasi masyarakat juga akan dibahas dalam kegiatan musyawarah desa sampai ke tingkat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa (Musrenbangdes),” jelas Kakhfi. Hal ini agar aspirasi tersebut dapat menjadi dasar pembahasan penganggaran APB Desa tahun berikutnya.

Kakhfi mengaku sangat terbantu dengan kegiatan ini. “Selama ini kami selaku BPD tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat desa dan mempunyai batasan untuk berkomunikasi, kini tidak lagi dan masyarakat bisa mengetahui kerja-kerja kami sebagai perwakilan dari dusun untuk menyelesaikan dan mengawal aspirasi dan aduan sampai terealisasi dilaksanakan oleh pemerintah desa,” tuturnya.

Ke depannya, Kakhfi menargetkan untuk melaksanakan Posko Aspirasi setiap tahun. “Terus terang kami katakan baru pertama kali mengadakan kegiatan

pekan aspirasi dan kami sadar bahwa kegiatan ini harus kami lakukan setiap tahunnya demi untuk melaksanakan tugas dan fungsi kami selaku BPD,” tutur Sekretaris BPD yang sudah menjabat selama 6 tahun ini.

Ia mengagendakan perencanaan yang berbasis data sebagai buah dari Posko Aspirasi selanjutnya. Sebuah rencana, yang tentunya akan disambut warga Bonto Tirto seperti Daeng Baji dan Daeng Hawa.

“Segera sampaikan ke Posko Aspirasi atau pemerintah desa, karena tidak pakai waktu lama, dokumen yang dibutuhkan segera diuruskan dan diantar langsung ke rumah masing-masing,” ujar Daeng Baji, mengajak sesama warga dusunnya untuk berpartisipasi dalam Posko Aspirasi.

Semoga Posko Aspirasi tetap ada, agar dapat membantu masyarakat desa dan pemerintah desa,” Daeng Hawa menuturkan harapannya.

Asa dari PTPD untuk Desa



RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen kunci bagi desa untuk melayani masyarakatnya dengan baik. ▲

Tak seperti kantor kecamatan pada umumnya, kantor Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ini punya sebuah 'Klinik'. Ini bukan 'Klinik' biasa tempat mengobati warga yang sakit. Ini adalah 'Klinik' khusus yang didedikasikan untuk membantu desa menghadapi berbagai persoalan tata kelola pemerintahannya.

"Hampir tiap hari, kami menerima perangkat desa yang datang untuk berkonsultasi. Macam-macam yang ditanyakan. Tapi kebanyakan soal bagaimana menyusun dan menyiapkan RKP Desa ataupun APB Desa," jelas Muryati, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kasi PMD) Kecamatan Belik.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, peran dan fungsi kecamatan semakin dibutuhkan dalam pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kecamatan sebagai wilayah administratif terdekat dengan desa, sesuai fungsi tugasnya melakukan fasilitasi penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan desa, termasuk dalam perencanaan partisipatif desa.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan desa bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan KOMPAK, membuat model percontohan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa atau PKAD Terpadu.

Kecamatan Belik kemudian ditetapkan menjadi satu lokasi percontohan. Untuk mendukung proyek percontohan ini, serangkaian pelatihan mulai diselenggarakan bagi perangkat kecamatan yang merupakan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) di tahun 2017.

Tujuannya, untuk memperkuat tugas dan fungsi pokok kecamatan dalam membina, mengawasi serta meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. "Dari pelatihan-pelatihan itu, kami belajar banyak hal khususnya yang berkaitan dengan regulasi, perencanaan dan penganggaran desa," sebut Muryati yang juga bertanggung jawab sebagai PTPD ini.

Tugas pembinaan, pengawasan serta peningkatan kapasitas aparatur desa oleh kecamatan ini semakin efektif, dengan hadirnya PTPD dan Klinik Desa. Menurut Muryati, sebelum adanya peningkatan kapasitas aparatur kecamatan, 9 dari 12 desa di wilayah tersebut acapkali terlambat mengesahkan RKP Desa dan APB Desa. Padahal kedua dokumen tersebut menjadi kunci utama bagi desa, agar dapat melayani masyarakat dengan baik.

"Ya sangat membantu kami, karena kalau ada kesalahan (saat menyusun RKP Desa maupun APB Desa) bisa berkonsultasi. Tak hanya

itu, kini urusan pelaporan cukup berkoordinasi dengan kecamatan. Beda sekali sebelum ada PTPD. Kami yang notabene jauh dari pusat pemerintah harus bolak-balik ke pemda kalau ada kesalahan, itu pun tak hanya sekali bisa berkali-kali, alhasil menghabiskan waktu dan tenaga," papar Tono Amboro Sekretaris Desa Sikasur, Kecamatan Belik.

Tak hanya Tono, dengan adanya PTPD, Gading Sinaratri juga merasakan dukungan yang sangat besar untuk kerja-kerjanya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di Desa Gunung Jaya. Gading, termasuk perangkat desa yang paling rajin berdiskusi dengan PTPD. Selain berkonsultasi terkait administrasi desa maupun aset desa, Gading kerap meminta bimbingan terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran desa. "Kalau sudah ke klinik lebih jelas. Apalagi untuk menyusun laporan anggaran. Sering juga kami berkonsultasi lewat grup *WhatsApp*," ujarnya.

Dua Desa Jadi Percontohan Pendampingan PTPD

Secara khusus KOMPAK mendampingi uji coba pelaksanaan PTPD di Desa Sikasur dan Desa Kuta, Kecamatan Belik, meski PTPD juga tetap mendampingi desa-desa lain di kecamatan ini. Selain memfasilitasi pelatihan secara klasikal, KOMPAK juga melakukan penguatan melalui metode *on-the-job training* dengan menghadirkan mentor

guna mendampingi proses fasilitasi. Hasilnya, dua desa tersebut menjadi acuan dalam hal pelaksanaan pelaporan keuangan dan peningkatan kapasitas aparatur desa di Kabupaten Pemalang.

Heru Weweg Sambodo, Camat Belik, yang juga menjadi pelaksana teknis sebagai kepanjangan tangan Bupati Pemalang untuk Tim PTPD menerangkan, harusnya tak hanya 12 desa di Kecamatan Belik, semua desa di Kabupaten Pemalang yang berjumlah 211 desa juga layak mendapat pendampingan serupa. "Untuk itu kami berharap semua desa yang belum tersentuh KOMPAK bisa mendapat pendampingan juga. Supaya tidak ada perbedaan mengenai strategi pendekatan administrasi mengenai pelaporan keuangan," ujarnya.

Ia mengakui pendampingan memberi banyak manfaat bagi desa agar laporan keuangan bisa satu jalur dan terarah, sesuai Peraturan Bupati yang mengharuskan semua desa menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). "Praktik baik seperti itu wajib dikembangkan dan diterapkan ke desa lain, karena hasilnya memberikan kepercayaan kepada desa yang dibimbing dan membantu desa dalam hal pertanggungjawaban ke pemerintah. Kami harap KOMPAK masih bisa bersinergi dengan pemerintah desa, kecamatan, hingga pemda," kata Heru.



Kecamatan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam perencanaan partisipatif desa. ▲

Adapun Sodik Ismanto Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Pemalang menuturkan, inovasi yang dilakukan oleh KOMPAK menggugah tatanan di tingkat kabupaten. “Karena KOMPAK mendukung kami saat kami mengalami kendala baik di tingkat kabupaten hingga desa dengan menghadirkan narasumber berkompeten. Hal itu mengedukasi dan mencerahkan kami,” jelasnya.

Menurutnya rangkaian program yang disusun KOMPAK, baik regulasi hingga penguatan kapasitas aparatur desa hingga kabupaten yang sudah berjalan, menentukan rel rencana pemerintahan ke depan. “Hal itu yang kami padukan untuk membuat tatanan pemerintahan lebih baik. Dorongan itu membuat sinergi antar lintas Organisasi

Perangkat Daerah atau OPD bersama KOMPAK menghasilkan perubahan, dan menyadarkan kami mengenai permasalahan yang harus diselesaikan secara komprehensif,” katanya.

Pelebagaan PTPD di Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pemalang

Sejak diperkenalkan pada 2017, lebih dari 80% desa di Kecamatan Belik sudah menaikkan alokasi pelayanan dasar sebesar 8 – 10%, termasuk juga anggaran untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD). Desa juga semakin partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan desa.

Keberhasilan pelaksanaan percontohan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di Kecamatan Belik mendorong Pemerintah Kabupaten Pemalang melembagakan PTPD.

Melalui dukungan KOMPAK yang secara intensif berkoordinasi dengan Dinpermasdes Kabupaten Pemalang, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pemalang serta OPD terkait, pada Mei 2019 akhirnya terbit Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2019.

Peraturan Bupati tersebut kemudian menjadi landasan hukum untuk pelembagaan PTPD di seluruh kecamatan di Kabupaten Pemalang. “Persoalan desa sekarang semakin kompleks. Kita punya 211 desa disini. Ini PR bersama, bagaimana desa di kecamatan lain juga mendapat pendampingan yang maksimal,” terang Bagus Sutopo, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinpermasdes Pemalang.

Meski aturannya sudah ada, namun Bagus menilai menyelenggarakan PTPD di seluruh wilayah Pemalang bukan persoalan mudah. Selain masalah anggaran, persoalan SDM juga menjadi tantangan. “Ini yang selalu menjadi diskusi saya sama tim KOMPAK. Apa tim KOMPAK bisa juga mendampingi semua kecamatan seperti di Belik? Tentu tidak. Ini yang harus kita pikirkan,” pungkasnya.

Tak lagi dipungkiri, PTPD membawa secercah harapan untuk tata kelola desa yang efektif dan lebih baik di Kabupaten Pemalang. Dengan begitu tak perlu menunggu lama bagi Pemalang mewujudkan cita-citanya untuk maju sejahtera.

Klinik Gampong: Memberdayakan Aparatur Gampong, Memberdayakan Masyarakat



Berkat peran Klinik Gampong, kegiatan lintas sektor di gampong dan kecamatan menjadi lebih terkoordinasi (foto diambil sebelum pandemi). ▲

Kapasitas aparatur gampong yang minim sudah tidak lagi menjadi kekhawatiran masyarakat di Kabupaten Bireuen, Aceh berkat adanya Klinik Gampong. Inisiatif pemerintah kabupaten, kecamatan dan KOMPAK ini telah membantu perangkat desa dan kecamatan meningkatkan kemampuannya. Sehingga masyarakat dapat menikmati tata kelola desa yang optimal.

Sejak mulai berkarya di kantor Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireun, Aceh, di tahun 2017, Lindayani merasa resah. Staf Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* (PMG) ini harus melakukan banyak kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, aparatur desa, kader desa dan kegiatan kelembagaan perempuan di desa. Namun kapasitas aparatur *gampong* (desa) saat itu masih sangat minim dalam memahami regulasi, kebijakan serta teknis pengelolaan desa seperti perencanaan keuangan desa.

"Jarak antara *gampong* dengan pusat pemerintahan kabupaten menyulitkan koordinasi dan konsultasi aparatur desa dengan pemerintah kabupaten," tutur Lindayani. Akibatnya, pembinaan aparatur *gampong* oleh pemerintah menjadi tidak optimal.

Penyusunan rencana dan anggaran sering kali tidak relevan dengan kebutuhan *gampong*.

Demikian juga laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) *Gampong* dan pengelolaan keuangan belum dapat disajikan sesuai standar dan rawan manipulasi.

Keresahan Lindayani terjawab ketika pemerintah kabupaten dan kecamatan meluncurkan program Klinik *Gampong*, sebagai bagian dari program Pengembangan Kapasitas Aparatur *Gampong* (PKAG), didukung oleh KOMPAK. Klinik *Gampong* adalah program pengembangan kapasitas pemerintah *gampong* melalui pelatihan dan bimbingan, koordinasi, konsultasi, dan berbagi informasi, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran untuk dana *gampong*.

Klinik *Gampong* terdiri dari Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD) yang dilakukan di tingkat *gampong*, penguatan kapasitas aparatur di kecamatan dan pembekalan teknis yang dilakukan di kabupaten seperti sosialisasi atau orientasi kebijakan secara umum.

Kabupaten, kecamatan, dan pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* (P3MG) terlibat penuh menyusun program kerja Klinik *Gampong*. KOMPAK kemudian memberikan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola Klinik *Gampong* dalam bentuk pelatihan dan pendampingan

serta menyediakan panduan dan modul penguatan kapasitas.

Setelah konsep *rampung*, Klinik *Gampong* dibentuk di kecamatan wilayah kerja KOMPAK, salah satunya Kecamatan Simpang Mamplam. Lindayani menjadi Pembina Teknis Pemerintah *Gampong* (PTPG) yang menjalankan program Klinik *Gampong*.

Aparatur kecamatan, tenaga pendamping profesional dan lintas sektor unit layanan di kecamatan mulai mengikuti Klinik *Gampong* dua kali setahun, dengan kisaran 50 hingga 60 peserta per *gampong*.

"Pertemuan kecil di tingkat kecamatan dilakukan untuk menyelesaikan kendala-kendala pemerintah *gampong*, selanjutnya membentuk tim teknis di tingkat kecamatan, dari layanan di klinik lalu mulai turun ke *gampong* dalam hal sosialisasi kebijakan dan dukungan teknis dalam perencanaan dan pembangunan *gampong*," Lindayani menjelaskan proses berjalannya Klinik *Gampong*.

Salah satu peserta pelatihan PTPG adalah staf Kecamatan Simpang Mamplam saat itu, Mursyidi, SH. "Kami belajar tentang tata kelola pemerintahan *gampong*, terutama perencanaan dan pembangunan *gampong*," tutur pria yang kemudian menjabat sebagai camat ini.

Pelaksanaan Klinik *Gampong* tidak selalu berjalan mulus. Sebagian besar tim PTPG

telah memiliki kepadatan pekerjaannya masing-masing. "Kapasitas PTPG, tenaga teknis, pembiayaan dan akomodasi yang terbatas menjadi tantangan tersendiri," tutur Lindayani yang juga adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Simpang Mamplam.

Namun Lindayani dapat mengatasinya dengan kerja sama dengan Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian (SKPK), pendayagunaan tenaga pendamping profesional, serta pemanfaatan keuangan *gampong* melalui PbMAD. Hasilnya, banyak kegiatan pemerintah desa bisa diselesaikan dengan cepat dan terstruktur.

"Kami belajar tentang tata kelola pemerintahan *gampong*, terutama perencanaan dan pembangunan *gampong*," tutur Camat Samalanga, Mursyidi, SH tentang pelatihan PTPG yang pernah ia ikuti dulu saat masih bertugas sebagai staf di Kecamatan Simpang Mamplam. ■

"Kegiatan lintas sektor di *gampong* dan kecamatan menjadi lebih terkoordinasi. Informasi dan regulasi terbaru cepat tersampaikan. Penyampaian kewenangan *gampong* lebih tersusun dengan baik antar aparatur," tutur Mursyidi.

“Beberapa kasus dapat diselesaikan melalui pendekatan Klinik *Gampong* terutama dalam hal pengisian perangkat *gampong*, penyelesaian pengisian kelembagaan *gampong*, penyelesaian tapal batas *gampong* dan penyelesaian sengketa akibat salah paham antara *keuchik* dengan Badan Permusyawaratan *Gampong* (BPG),” tambah camat berusia 44 tahun ini.

Manfaat ini juga langsung terasa oleh masyarakat setempat. Wardiana, tokoh masyarakat *Gampong* Keude Tambo menuturkan Klinik *Gampong* sangat berperan baik untuk kemajuan *gampong* terutama dalam hal peningkatan kapasitas aparatur *gampong* dan perbaikan tata kelola pemerintahan *gampong*.

“Banyak sekali dampak untuk *gampong*, dapat menyelesaikan berbagai permasalahan di salah satunya adalah menyelesaikan administrasi di *gampong*,” ujar Wardiana yang sehari-harinya bekerja sebagai guru honorer.

Hal-hal terkait administrasi tersebut biasanya terkait dengan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban dana *gampong*, di mana Klinik *Gampong* kemudian memberikan pendampingan kepada perangkat *gampong* dalam hal tata usaha dana *gampong*.

Pria berusia 55 tahun ini awalnya belum paham tentang tujuan dibentuknya Klinik



Klinik *Gampong* diadakan dua kali dalam setahun dengan kisaran 50 hingga 60 peserta per *gampong* ▲ (foto diambil sebelum pandemi).

Gampong. Namun seiring waktu, ia merasakan bahwa keberadaan Klinik *Gampong* sangat berdampak positif untuk pembangunan *gampong*. Wardiana juga melihat betapa petugas *gampong* kini lebih dapat berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan di *gampong*.

Kini, empat kecamatan di Kabupaten Bireuen telah menyusun Standar Pelayanan dan Operasional Klinik *Gampong*. Mursyidi yang telah pindah tugas menjadi camat di Samalanga pada tahun 2020, membentuk dan mengembangkan Klinik *Peutah Gampong* di Kecamatan Samalanga.

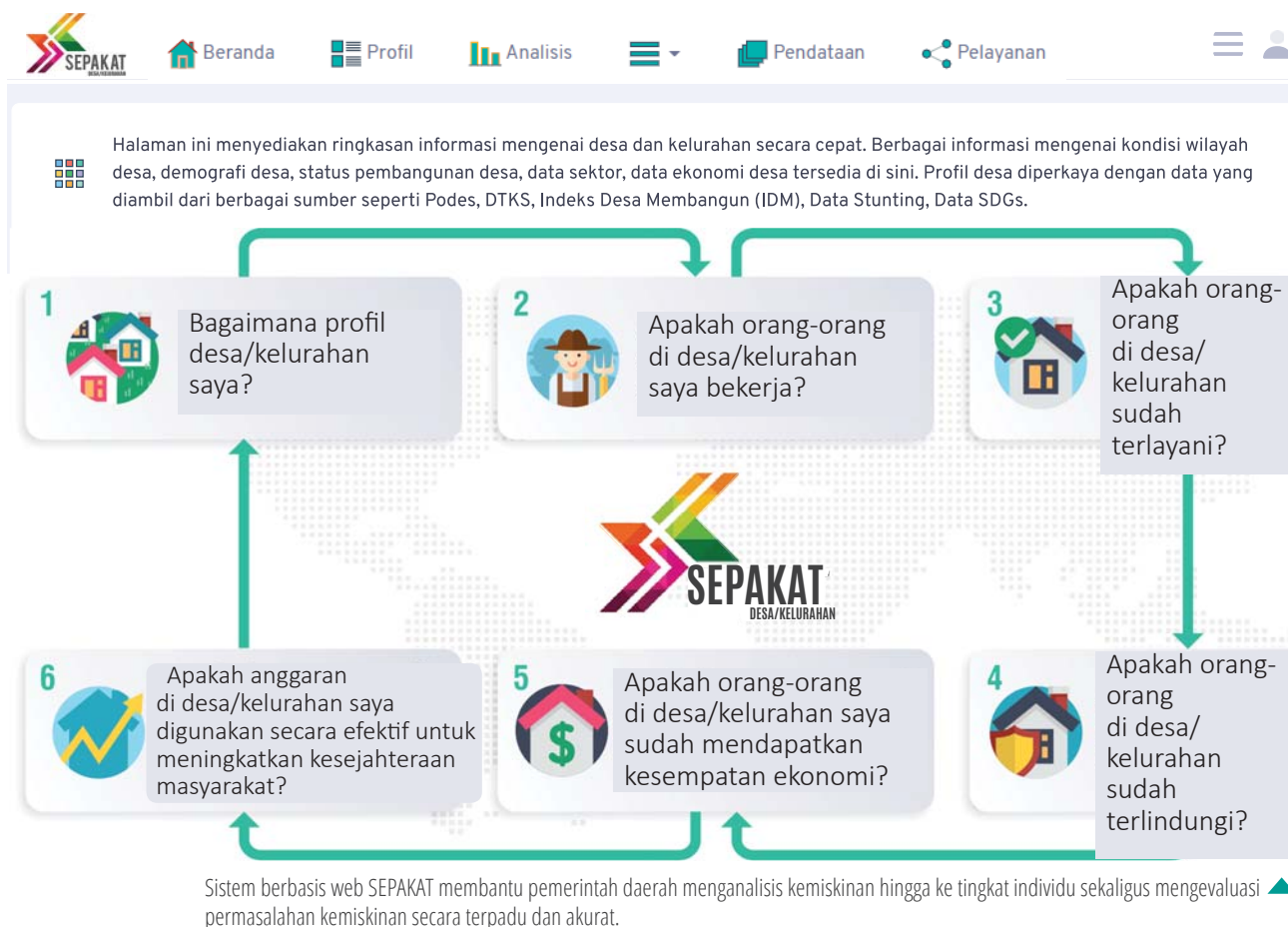
Pemerintah Provinsi Aceh juga telah menyusun peraturan gubernur tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan *gampong* untuk memastikan Klinik *Gampong* dapat berkelanjutan. Pada tahun

anggaran 2021, Provinsi Aceh juga telah menyiapkan dana pengoptimalan peran pembinaan *gampong* oleh kecamatan.

Inisiatif ini didukung oleh Kabupaten Bireuen yang membentuk Tim Koordinasi PKAG Terpadu yang bertugas melakukan perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan PKAG terpadu, baik dari sisi anggaran, penguatan kapasitas maupun administrasi.

Masyarakat pun berharap bahwa program Klinik *Gampong* dapat terus berjalan. “Supaya perangkat *gampong* lebih bisa melakukan hubungan baik, sehingga apa yang dibutuhkan oleh *gampong* dapat direspon dengan baik,” tutur Wardiana, yang juga merupakan harapan semua warga Bireuen.

SEPAKAT: Menyediakan Data Akurat untuk Program Penanggulangan Kemiskinan yang Tepat Sasaran



“Dulu kami mengalami kesulitan setiap akan menyusun program penanggulangan kemiskinan,” terang Etavianti, Kepala Subbidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bireuen. “Ini dikarenakan kami belum memiliki data kemiskinan yang lengkap dan rinci,” imbuh Etavianti.

Menurut Eta, Pemerintah Kabupaten Bireuen mengandalkan data Badan Pusat Statistik (BPS), namun data BPS belum detail. Data BPS baru menampilkan angka kemiskinan atau jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bireuen. Padahal Bappeda membutuhkan data yang lebih spesifik seperti data anak putus sekolah, jumlah penyandang disabilitas, atau kondisi layanan kesehatan. “Termasuk di dalamnya pemicu anak putus sekolah atau faktor-faktor penyebab kemiskinan,” tukas Eta.

Menyiasati hal ini, pemerintah daerah menggunakan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). “Tapi data TNP2K pun perlu diperbaharui secara manual oleh pemerintah daerah sendiri. Jadi Bappeda tetap harus mencari data dari setiap Organisasi Perangkat Daerah atau OPD untuk dimasukkan dalam aplikasi milik TNP2K,” jelas Eta lagi.

Kerepotan Etavianti akhirnya berakhir sejak mengenal Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu atau yang lebih dikenal dengan SEPAKAT. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan dukungan KOMPAK dan Bank Dunia mengembangkan SEPAKAT sebagai sistem berbasis web yang membantu pemerintah daerah melakukan analisis mandiri guna mencari solusi penanggulangan kemiskinan di wilayah mereka. SEPAKAT membantu pemerintah daerah menganalisis kemiskinan hingga ke tingkat individu sekaligus mengevaluasi permasalahan kemiskinan secara terpadu dan akurat.

"Kami mengenal SEPAKAT tahun 2018, waktu Bappeda Aceh bersama KOMPAK mengundang Bappeda kabupaten/kota untuk mengikuti pelatihan SEPAKAT," tutur perempuan yang menjabat sebagai kepala subbidang sejak 2015 ini. Pelatihan ini membuka mata Etavianti pada kemampuan yang dimiliki SEPAKAT, khususnya dalam menyediakan data beragam terkait kemiskinan. "SEPAKAT ini luar biasa karena data yang ada di dalamnya sangat lengkap. Ada data kependudukan, kerentanan, ketimpangan, data layanan dasar dan sebagainya," jelasnya. "Selain lengkap, datanya juga rinci. Misalnya ada data anak putus sekolah usia 15 tahun ke bawah, atau data anak usia SD dan SMP yang tidak

bersekolah, bahkan sampai tingkat kuintil," terangnya lagi.

Pada 2020, Bappeda Kabupaten Bireuen menggunakan SEPAKAT untuk menyusun Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). LP2KD berisi laporan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan selama satu tahun terakhir. Data SEPAKAT digunakan untuk memaparkan tingkat kemiskinan, kedalaman dan keparahan kemiskinan, serta akses masyarakat pada layanan pendidikan dan kesehatan. "SEPAKAT berperan menyediakan basis data serta analisis penyebab kemiskinan. Hal ini membantu kami melihat akar masalah kemiskinan dan data terkini kemiskinan, sehingga pemerintah daerah bisa menyusun program penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran," ungkap Eta.

"SEPAKAT berperan menyediakan basis data serta analisis penyebab kemiskinan," ungkap Etavianti, Kepala Subbidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, Bappeda Bireuen.

Bappeda Bireuen berencana memperluas penggunaan SEPAKAT untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi 2022 serta Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu. Untuk

itu, Subbidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial telah menerbitkan Buku Saku Profil Kemiskinan Bireuen. Buku ini memuat data-data kemiskinan SEPAKAT maupun Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Eta berharap buku ini mampu mendorong OPD untuk menggunakan SEPAKAT dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan.

Kuintil merupakan pengelompokan pengeluaran rumah tangga yang dilakukan oleh BPS, dalam lima kelompok sama besar. Kuintil menjadi acuan kelompok rumah tangga di Indonesia yang diukur berdasarkan pengeluaran perkapita. Oleh BPS, kelompok pengeluaran rumah tangga total dengan nilai 100 persen dibagi dalam lima kuintil, dengan kata lain kuintil 1 merupakan 20 persen rumah tangga dengan pengeluaran terendah, terus meningkat hingga kuintil 5 yang merupakan 20 persen rumah tangga dengan pengeluaran perkapita tertinggi.

"Selain itu kami akan melibatkan perguruan tinggi dalam rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan. Di sana kami akan mengenalkan SEPAKAT sekaligus mengajak perguruan tinggi untuk menggunakan aplikasi ini. Pelibatan akademisi ini penting untuk memperkaya hasil analisis SEPAKAT sehingga mampu berkontribusi menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bireuen," tutupnya.

KLIK PEKKA Trenggalek dan Ikhtiar Penuh Layani Masyarakat



Para kader PEKKA membantu mengarahkan warga ke meja-meja konsultasi sesuai jenis kasus yang dialami (foto diambil sebelum pandemi).

Melihat banyaknya warga yang masih kesulitan mengakses pelayanan dasar karena terbatasnya infrastruktur desa, kader Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten Trenggalek tak tinggal diam. Bekerjasama dengan KOMPAK dan sejumlah instansi, PEKKA menyelenggarakan KLIK atau Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi di Balai Desa Karanganyar. KLIK PEKKA tak hanya melayani konsultasi namun juga memberikan pelayanan kesehatan cuma-cuma. Selain menuntaskan masalah warga dalam berbagai bidang, KLIK PEKKA diharapkan dapat menjadi bekal pemerintah memberikan pelayanan dasar yang lebih berkualitas.

Waktu masih menunjukkan pukul delapan pagi namun warga Desa Karanganyar, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, sudah ramai mendatangi Balai Desa. Hari itu, warga menanti dengan sangat antusias untuk mendapatkan berbagai jenis pelayanan dari KLIK atau Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi yang diselenggarakan oleh PEKKA.

KLIK (Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi) PEKKA memberikan pelayanan administrasi kependudukan, konsultasi pendidikan, konsultasi program perlindungan sosial dan hukum, sekaligus pemeriksaan kesehatan. Lima belas kader PEKKA, tujuh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten Trenggalek, dan enam tenaga kesehatan dari puskesmas Kecamatan Pule ikut terlibat dalam pelayanan lintas bidang yang baru pertama kalinya diselenggarakan di Desa Karanganyar ini. KOMPAK membantu PEKKA berkomunikasi dengan narasumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek sehingga mereka hadir dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Di meja pendaftaran, sejumlah kader PEKKA membantu warga mengisi daftar hadir dan mengidentifikasi jenis kasus yang akan dikonsultasikan. Para kader kemudian mengarahkan warga ke meja-meja konsultasi sesuai jenis kasus yang dialami.

Warga yang membutuhkan layanan konsultasi hukum diarahkan menuju meja hukum dan perlindungan sosial dengan narasumber kader PEKKA dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial PPPA) Kabupaten Trenggalek. Warga yang memerlukan layanan kesehatan bisa berkonsultasi dan memeriksakan diri



dengan tenaga kesehatan dari puskesmas. Warga yang ingin membuat dokumen administrasi kependudukan bisa berkonsultasi dengan petugas Dinas Dukcapil. Warga yang hendak konsultasi pendidikan bisa bertanya pada petugas dari Dinas Pendidikan.

Dengan penuh antusias, warga menyampaikan permasalahan yang mereka alami dan mendapatkan solusinya. Warga yang sudah selesai berkonsultasi dapat memberi masukan terkait layanan KLIK PEKKA dengan mengisi formulir di kotak saran. Pelayanan resmi berakhir pukul 15.00 WIB namun karena pengurusan dokumen administrasi kependudukan membutuhkan waktu lebih lama, petugas masih melayani warga hingga pukul 17.00 WIB. Pada akhir kegiatan, KLIK PEKKA melayani 376 kasus dengan rincian 125 terkait dokumen kependudukan, 125 kasus kesehatan, 97 kasus sosial, dan 29 kasus pendidikan.

Permasalahan yang dikonsultasikan sangatlah beragam. Rusdi (54), misalnya,

sengaja datang untuk mengajukan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi keponakannya yang berusia 19 tahun dan kini tinggal bersama neneknya. Sang keponakan yang yatim piatu tadinya siswa cerdas dan selalu juara kelas. Keterbatasan ekonomi memaksanya putus sekolah dan merantau dua bulan menjadi pembantu rumah tangga di Surabaya. Sepulang dari Surabaya, ia menderita depresi. Rusdi pun mengupayakan segala jenis bantuan demi memulihkan kondisi keponakannya, termasuk mengajukan KIS.

Terkait dokumen kependudukan, Marmi (51) mengeluhkan kesulitannya memperbaharui KTP karena jauhnya jarak menuju kantor Dinas Dukcapil. Buruh tani yang memiliki dua anak ini mengatakan bahwa jarak dari rumahnya ke kantor Dinas Dukcapil mencapai 27 km dengan biaya pulang-pergi minimal Rp100.000. Padahal, mengurus pembaharuan KTP biasanya membutuhkan waktu lebih dari sehari sehingga dipastikan memakan biaya

yang sangat besar, mengurus sebagian besar penghasilannya sebagai buruh tani yang hanya berkisar Rp500.000 per bulan.

Mengetahui kesulitan Marmi, salah seorang kader PEKKA menginformasikan rencana pelayanan KLIK PEKKA di Balai Desa yang segera disambut antusias Marmi. Berbekal Kartu Keluarga (KK), petugas segera melakukan perekaman data. Satu minggu kemudian, kader PEKKA mengantar KTP baru ke rumah Marmi. "Saya senang sekali karena akhirnya bisa mengurus KTP tanpa perlu keluar biaya. Saya sangat terbantu oleh kader PEKKA, perangkat desa, dan petugas Dinas Dukcapil," ucap Marmi.

Peran kader PEKKA diakui Tariyem (51) yang juga datang ke Balai Desa untuk memperbarui KTP setelah suaminya meninggal dunia. Seperti halnya Marmi, Tariyem merasa jarak dari rumahnya menuju kantor Dinas Dukcapil terlalu jauh sehingga memerlukan ongkos transportasi yang besar. Kader PEKKA yang sudah mengetahui kondisi Tariyem segera memberitahukan rencana pelayanan KLIK PEKKA di Balai Desa hingga ia akhirnya berhasil memperbaharui KTP tanpa harus merogoh kocek.

Secara keseluruhan, persoalan terkait dokumen kependudukan sudah tertangani 100 persen. Meski demikian, sejumlah usulan terkait penerima manfaat program-program perlindungan sosial tidak dapat diputuskan

secara langsung oleh kader PEKKA, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Kabupaten karena harus diajukan lebih dulu pada Kementerian Sosial sebelum ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek.

Dhesi Vienayanti (45) yang menjabat sebagai fasilitator lapangan PEKKA Jawa Timur periode 2019–2020 menjelaskan bahwa sebelum pelayanan perdana KLIK, PEKKA sebenarnya sudah membuka pelayanan konsultasi hukum dan perlindungan sosial bekerjasama dengan KOMPAK dan Dinas Dukcapil. Pelayanan semacam ini sangat dibutuhkan warga mengingat jauhnya jarak antara Desa Karanganyar dengan ibukota kabupaten, terlebih dengan kondisi infrastruktur jalan desa yang masih amat minim.

Untuk memperluas cakupan pelayanan dasar, PEKKA berinisiatif memfasilitasi pelayanan kesehatan sekaligus konsultasi pendidikan secara langsung dengan menggandeng berbagai pihak terkait seperti Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Inisiatif ini disambut positif oleh Kepala Desa Karanganyar, Kuslan, yang segera menawarkan diri membantu persiapan pelaksanaan kegiatan KLIK PEKKA sesuai kapasitasnya.

Inisiatif yang didukung KOMPAK ini menuai hasil memuaskan.

Berbagai permasalahan warga Desa Karanganyar teratasi dengan baik. Pemerintah Kabupaten Trenggalek pun berhasil mengumpulkan data-data permasalahan yang banyak dialami warga dalam bidang kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, hukum, perlindungan sosial, dan lain-lain. Data-data tersebut diharapkan dapat menjadi tolak ukur kebijakan pelayanan dasar yang lebih tepat sasaran dan lebih berkualitas.

"Data-data permasalahan warga yang berhasil kami kumpulkan dalam pelayanan KLIK PEKKA langsung kami diskusikan keesokan harinya bersama Pemerintah Desa Karanganyar dan Pemerintah Kecamatan Pule. Data-data ini menjadi gambaran awal yang baik untuk melihat berbagai persoalan yang sering muncul dalam bidang kesehatan, hukum, dokumen kependudukan, dan sebagainya," terang Dhesi.

Merasa puas memperoleh layanan konsultasi masalah sosial dan pemeriksaan kesehatan cuma-cuma, warga desa berharap KLIK PEKKA tak cuma diselenggarakan satu kali. "Kami senang karena dapat berkonsultasi sekaligus berobat gratis tanpa harus membayar sama sekali. Mudah-mudahan KLIK PEKKA bisa diadakan lagi di desa kami," harap Sutanto, seorang warga Desa Karanganyar.

Klinik Desa Membangun, Solusi inovatif Perbaikan Tata Kelola Desa



Terbentuknya KDM memudahkan PTPD melatih aparatur desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang pro pelayanan dasar. ▲
(foto diambil sebelum pandemi)

Seiring pemberlakuan UU Desa, kapasitas aparatur menjadi faktor penentu kualitas tata kelola pemerintahan desa. Menyadari hal ini, Camat Aikmel di Lombok Timur, NTB, menggagas “Klinik Desa Membangun” (KDM) sebagai wujud pelebagaan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) menuju tata kelola desa yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan. Aspirasi masyarakat desa menjadi rujukan utama pengambilan keputusan. Didukung KOMPAK dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, KDM berhasil memperbaiki postur¹ APB Desa yang pro pada pelayanan dasar.

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat dan peran yang lebih luas bagi pemerintah desa dalam mengelola urusan desanya –termasuk dalam kewenangan, keuangan, dan pembangunan desa. Peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi syarat mutlak agar masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan. Sayangnya, upaya-upaya yang dilakukan kebanyakan desa cenderung sporadis dan sentralistik. Kecepatan penguatan kapasitas aparatur pun tak mampu mengimbangi kecepatan dinamika yang terjadi dalam implementasi UU Desa.

¹ Istilah ‘postur’ pada umumnya digunakan dalam diskusi APBN. Secara harfiah dapat memberi arti yang sama untuk istilah “Anggaran Pendapatan dan Belanja” yang dipakai secara resmi dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945. Dimana secara teknis akuntansi, APB Desa disusun dalam besaran yang sama antara jumlah pendapatan dan jumlah belanja desa (Kemenkeu, 2014).

Peliknya persoalan ini sangat disadari H. Hadi Fathurahman, Camat Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sejak menjabat sebagai camat pada Januari 2016, Hadi yakin bahwa penguatan kapasitas aparatur desa melalui peran Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) merupakan pilihan terbaik untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.

Mengingat kompleksitas tata kelola desa, Hadi sadar pihak kecamatan tidak dapat bekerja sendirian. Ia pun menginisiasi lahirnya “Klinik Desa Membangun” (KDM) sebagai wadah koordinasi berbagai pemangku kepentingan. Seperti halnya klinik yang berfungsi mengobati orang sakit, KDM bertujuan mengobati berbagai persoalan desa yang rumit – terutama terkait pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang besar artinya bagi masyarakat miskin dan rentan.

Terbentuknya KDM memudahkan PTPD melatih aparatur desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang pro pelayanan dasar. Layanan PTPD yang awalnya hanya Divisi Penguatan Kapasitas Aparatur mulai ditambah dengan divisi-divisi lainnya seperti “Advokasi Pengaduan” terkait tata kelola desa, “Desa Belajar” terkait praktik baik desa, serta “Pemantauan dan Evaluasi”

terkait kontribusi KDM terhadap perbaikan tata kelola desa.

Selain PTPD sebagai tulang punggung, KDM juga melibatkan banyak pemangku kepentingan lainnya seperti Puskesmas, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan, serta para fasilitator Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). PTPD turut merangkul LSM lokal dan nasional yang selama ini berjuang mendampingi masyarakat miskin dan rentan di Kecamatan Aikmel.

Personil yang mewakili berbagai pemangku kepentingan kemudian direkrut menjadi ‘fasilitator belajar’ KDM, yang bertugas memandu dan memfasilitasi penguatan kapasitas aparatur desa, mengoordinasikan para *stakeholder* kecamatan, serta memberi rekomendasi dan advokasi untuk tata kelola desa yang lebih baik. KDM menerjunkan tiga tim fasilitator dengan jadwal pelayanan 24 jam non-stop. Dalam sehari, satu tim fasilitator mampu memfasilitasi tiga desa.

KOMPAK berperan mengadvokasi pelembagaan KDM melalui regulasi serta membantu penyusunan tata laksana atau SOP yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan KDM di Kecamatan

Aikmel. KOMPAK juga aktif membantu penyusunan beragam jenis panduan untuk menguatkan kapasitas, termasuk panduan fasilitasi dan panduan memimpin rapat, hingga PTPD siap mengawal perencanaan dan penganggaran desa yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan.

“Saya sangat berterima kasih kepada KOMPAK. Setelah KDM terbentuk, penyusunan RKP Desa dan APB Desa selama tiga tahun terakhir tidak pernah terlambat, bahkan yang paling cepat,” papar Hanah (53), Kepala Desa Toya, Kecamatan Aikmel.

Menurut Hanah, KDM tak hanya meningkatkan kapasitas aparatur desa namun juga berperan besar mengubah paradigma tata kelola desa yang tadinya bersifat *top-down* menjadi *bottom-up*.² Pasalnya, tahap perencanaan selalu mempertimbangkan hasil musyawarah desa yang merupakan wadah bagi warga untuk menyuarakan aspirasinya. Musyawarah ini turut mengundang anak muda, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lain yang sebelumnya tidak pernah dilibatkan.

“Dalam musyawarah desa, *capun-capun* (lansia 60 tahun ke atas) meminta tongkat untuk berjalan, kursi roda, kacamata supaya bisa melihat lebih jelas, juga pelayanan kesehatan gratis. Ada juga anak muda

² pendekatan *top-down* (atas-bawah) dan *bottom-up* (bawah-atas) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselenggarakan melalui musyawarah (UU No. 25/2004).

yang minta pelatihan komputer. Hasil musyawarah inilah yang kami tuangkan dalam RKP Desa. Apa yang menjadi kehendak masyarakat, itulah yang kami kerjakan,” papar Hanah.

Melalui perencanaan dan penganggaran yang baik, kualitas pelayanan dasar masyarakat meningkat. fasilitator KDM juga membuka diri menjadi mitra pemerintah desa dalam melaksanakan program-program pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, ambulans yang selalu siaga dalam situasi darurat, pengelolaan sampah rumah tangga, hingga administrasi kependudukan (adminduk).

Tak kalah penting, fasilitator KDM membantu memperlancar proses distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sangat dibutuhkan warga miskin mulai dari tahap penganggaran, perencanaan, hingga eksekusinya. Data adminduk yang sinkron dengan data-data lainnya menjadi faktor krusial agar BLT benar-benar diterima mereka yang berhak sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih bantuan sosial.

Fasilitator KDM juga membuka diri menjadi mitra pemerintah desa dalam melaksanakan program-program pelayanan dasar. ■

Memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID), fasilitator KDM juga memberi arahan kepada pemerintah desa untuk mengidentifikasi masyarakat yang luput menerima BLT karena tidak memiliki data kependudukan yang disyaratkan. Selanjutnya, pemerintah desa bersama Pokja Adminduk menginisiasi layanan “jemput bola” untuk membantu warga desa mengurus data kependudukannya. Hasilnya, pembagian BLT di Kecamatan Aikmel selalu berjalan lancar tanpa *kekisruhan*, juga tak pernah *molor* dari jadwal yang telah ditentukan.

Salmini (45) adalah salah seorang warga Desa Toya yang memperoleh bantuan sosial atas masukan fasilitator KDM yang ditindaklanjuti pemerintah desa. Bekerja sebagai buruh tani tidak tetap, Salmini hanya menerima upah Rp20.000 – Rp50.000 per hari, itu pun hanya ketika musim panen tiba. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Salmini menyambi bekerja sebagai buruh angkut pasir dan batu bagi warga yang sedang membangun rumah.

Salmini yang ditinggal suaminya bekerja di Malaysia harus membiayai kebutuhan dua putrinya, Koryatun Toyibah (20) dan Umratul Ariya (16). Koryatun hanya menempuh pendidikan hingga Sekolah Dasar, sementara Umratul bersekolah di kelas 1 Madrasah Aliyah, setara Sekolah Menengah Atas. Selain itu, Salmini masih harus bertanggung jawab menafkahi

ibundanya, Papu Topik (70). Adakalanya ia terpaksa berhutang pada tetangga untuk membeli beras dan lauk bagi seisi rumah.

Kondisi memprihatinkan Salmini terdeteksi fasilitator KDM. Rupanya, Salmini belum pernah mendapatkan bantuan sosial apa pun. Salmini tak pernah mengajukannya karena tidak mengetahui program-program bantuan sosial pemerintah. Berbekal data ini, kader desa mendatangi Salmini untuk membantunya mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan hingga ia akhirnya menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Alhamdulillah. Saya senang dan gembira bisa mendapatkan bantuan untuk keperluan sehari-hari. Anak kedua saya juga mendapatkan BSM (Bantuan Siswa Miskin),” ucap Salmini.

Penerima bantuan lainnya yang juga warga Desa Toya, Muhammad Yazid (21), merupakan seorang penyandang disabilitas sejak lahir (tuna wicara). Menjadi tulang punggung keluarga, Yazid bekerja serabutan sebagai buruh kasar dengan upah hanya sekitar Rp5.000 – Rp10.000 per hari. Ia tinggal bersama ibunya yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan pendapatan teramat minim, Yazid selalu kesulitan memenuhi keperluan sehari-hari.

Suatu hari pada bulan puasa tahun 2020, Yazid yang sedang bekerja serabutan memanjat pohon kelapa tiba-tiba terjatuh hingga lengan kanannya patah. Tak punya ongkos berobat ke Rumah Sakit, Yazid mendatangi dukun patah tulang. Kondisinya berangsur membaik. Meski demikian, ia belum mampu mengangkat beban berat sehingga kesulitan bekerja kembali sebagai buruh kasar. Mengetahui kondisi Yazid, warga desa lainnya segera mendiskusikannya dalam musyawarah desa.

Berkoordinasi dengan fasilitator KDM, hasil musyawarah ditindaklanjuti pemerintah desa yang segera membantu Yazid mengurus KTP sebagai syarat menerima bantuan sosial.

Tahun itu juga Yazid menerima BST jalur penyandang disabilitas sebesar Rp 300.000 per bulan. Ibunda Yazid pun menerima BLT setelah petugas lapangan yang didampingi fasilitator KDM melakukan pendataan.

“Saya sangat berterima kasih karena bantuan ini membantu saya memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk membeli sabun dan baju baru,” tutur Yazid.

Menyadari arti penting musyawarah desa, Yazid memutuskan untuk melibatkan diri lebih lanjut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Toya sebagai perwakilan

kelompok penyandang disabilitas. Tuna wicara tak menghalangi Yazid menyampaikan aspirasinya di hadapan warga peserta Musrenbang dan kepala desa. Seiring waktu, Yazid yang awalnya sangat pemalu dan selalu merasa rendah diri jadi makin percaya diri dalam berkomunikasi dan bergaul.

Berkat kapasitas aparatur desa yang semakin pro-warga melalui KDM, warga miskin dan rentan yang belum terdata sebagai penerima bantuan sosial pemerintah akhirnya bisa menerima BLT, BST, dan PKH.

Di samping manfaat langsung bagi pemerintah desa serta warga miskin yang rentan seperti Salmini dan Yazid, kerja-kerja sistemik yang dilakukan PTPD selaku pengelola KDM Kecamatan Aikmel membuahkan prestasi manis. Diantaranya adalah meraih Peringkat III se-NTB untuk Kategori *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa (2017), Juara I se-NTB dalam Kategori “Fasilitasi dan Monitoring Pengelolaan Dana Desa yang Tepat Waktu dan Transparan” (2017), Penghargaan Dirjen Perbendaharaan Kanwil NTB atas “Ketepatan Waktu menyampaikan data APB Desa”

(2017), serta Penghargaan dari Bupati Lombok Timur untuk Kategori “Inovasi Kecamatan” dalam Bursa Inovasi Desa (2017).

Dari sisi kualitas perencanaan dan penganggaran desa, inisiatif KDM juga telah memperbaiki postur APB Desa yang pro pada pelayanan dasar. Alokasi anggaran untuk pelayanan dasar dari tahun ke tahun di desa-desa Kecamatan Aikmel terus meningkat dari 12,51% (2016) menjadi 14,8% (2019).³

Keberhasilan ini menginspirasi daerah-daerah lain mengikuti pola penguatan kapasitas aparatur yang dilakukan KDM Kecamatan Aikmel. PTPD yang telah melembagakan diri dalam bentuk sejenis KDM kini dapat ditemukan di Kabupaten Lombok Utara (Kecamatan Bayan), Kabupaten Bima (Kecamatan Bolo), Kabupaten Sumbawa (Kecamatan Plampang), dan Kabupaten Lombok Timur (Kecamatan Terara). KDM Bolo bahkan mereplikasi hampir seluruh kegiatan yang telah dilakukan KDM Aikmel.

³ Data merupakan data olahan tim studi KOMPAK. Persentase tersebut diolah dari definisi belanja “pelayanan dasar” untuk Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk), Pendidikan, dan Kesehatan.

Membangun Desa Inklusif Berkeadilan



Desa Mattiro Kanja, Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara menyelenggarakan musyawarah khusus perempuan, anak, dan penyandang disabilitas untuk mengakomodasi kebutuhan mereka dalam perencanaan pembangunan desa. ▲

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dikenal sebagai daerah 'tiga dimensi' dikarenakan wilayahnya yang meliputi pegunungan, daratan rendah dan kepulauan sehingga memiliki tantangan tersendiri dalam melaksanakan pembangunan terutama di desa. Pada wilayah kepulauan, pembangunan desa yang inklusi menjadi sebuah pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah daerah dikarenakan kondisi geografis yang menantang sehingga memerlukan penanganan dan strategi tersendiri.

Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pangkep untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp120 miliar, naik 100% dari tahun 2016 dimana total ADD yang diterima sebesar Rp60 miliar. Jumlah ini dibagikan ke 65 desa di Pangkep, sehingga setiap desa ada yang mendapatkan Rp1,8-2 miliar. Diharapkan dengan adanya peningkatan ADD, maka pembangunan desa yang berpihak kepada rakyat miskin dan rentan akan dapat terlaksana dengan baik.

Namun kondisi geografis yang menantang dan tidak mudah dijangkau berakibat kepada banyaknya kepala desa yang memerlukan pendampingan dan dukungan dalam penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) agar dapat selaras dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota yaitu pengentasan kemiskinan.

Guna mendukung hal tersebut, KOMPAK bekerja sama dengan mitra TAF-SAPP, YASMIB, untuk membantu pemerintah desa dan daerah dalam proses penyusunan RPJMDes menjadi lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat miskin. Salah satu desa kepulauan yang menjadi lokasi percontohan adalah Desa Mattiro Kanja.

Pada Januari 2017, Desa Mattiro Kanja berhasil menyelesaikan rancangan RPJMDes dan telah diajukan kepada pemerintah daerah. Rancangan tersebut mencakup komitmen desa untuk mempromosikan partisipasi kelompok marginal, termasuk penyandang disabilitas. ■

Kepala desa Mattiro Kanja Musakkir yang baru terpilih pada Desember 2016 mendorong diskusi formulasi rancangan RPJMDes bersama seluruh komponen masyarakat. Diskusi ini dihadiri oleh anggota sekolah perempuan, para pendamping desa, dan penyandang disabilitas. YASMIB, dengan dukungan dari Camat Liukang Tupabbiring Utara membantu perangkat Desa Mattiro Kanja memfasilitasi proses ini.

“Data yang telah berhasil dikumpulkan jangan hanya disimpan, harus kita gunakan agar kita dapat mengenali masalah yang ada dan mencari jalan keluarnya dalam menyusun RPJMDes yang berpihak kepada masyarakat miskin dan kaum marginal.” Kata Syamsura Syam, Camat Liukang Tupabiring Utara.

Pada Januari 2017, Desa Mattiro Kanja berhasil menyelesaikan rancangan RPJMDes dan telah diajukan kepada pemerintah daerah. Rancangan tersebut mencakup komitmen desa untuk mempromosikan partisipasi kelompok marginal, termasuk penyandang disabilitas.

KOMPAK bekerja sama dengan mitra TAF-SAPP, YASMIB, untuk membantu pemerintah desa dan daerah dalam proses penyusunan RPJMDes menjadi lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat miskin. ■

Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk dukungan pada kegiatan inklusi sosial seperti pengadaan alat-alat untuk penyandang disabilitas, diseminasi pergerakan masyarakat yang inklusi, pelayanan kesehatan bagi kelompok lansia dan penyandang disabilitas, pelatihan pelayanan yang

inklusif kepada para pemberi layanan bidang kesehatan dan pendidikan, mengumpulkan data statistik penyandang disabilitas yang dapat diakses di kantor desa, serta pembentukan forum untuk keluarga-keluarga penyandang disabilitas.

Membantu Pemerintah Desa Merencanakan dan Menyelenggarakan Layanan Dasar



Fasilitator PTPD memberikan dukungan ke desa-desa dalam mengembangkan dan mengevaluasi APB Desa ▲
(foto diambil sebelum pandemi).

"Saya adalah salah seorang fasilitator PTPD. Kami memberikan dukungan ke desa-desa dalam mengembangkan dan mengevaluasi APB Desa [Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa] mereka. Kami juga membantu desa menggunakan alat-alat yang membantu mereka dalam perencanaan dan penganggaran," jelas Darmujiadi. Dalam perannya sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD), Darmujiadi bertugas memberikan dukungan teknis kepada pemerintah desa di wilayah Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

Sejak 2015, sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi, Pemerintah Indonesia telah meningkatkan pendanaan langsung ke pemerintah desa hingga empat kali lipat. Ini berarti pemerintah desa memperoleh lebih banyak sumber daya dan wewenang dalam pengambilan keputusan, yang memungkinkan mereka merencanakan, menganggarkan, dan menyelenggarakan layanan masyarakat yang lebih baik. Menurut analisis KOMPAK, tiap pemerintah desa menerima sekitar dana Rp3 juta per warga, atau sekitar Rp10-15 miliar untuk desa dengan populasi 5.000 jiwa.

“Salah satu tantangan utama yang kami hadapi adalah kapasitas petugas desa. Selain membenahi peraturan dan meningkatkan pendanaan, kami juga perlu mengembangkan sumber daya manusia di desa-desa untuk dapat menjalankan wewenang yang lebih besar ini,” kata Darmujiadi.

Di sinilah pentingnya peran PTPD. Mereka menjadi mitra pemerintah desa untuk membantu mereka mengelola berbagai wewenang tersebut secara lebih efektif.

KOMPAK mengembangkan model asistensi teknis PTPD lewat kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari Strategi Nasional lebih luas tentang Penguatan Kapasitas Aparat Desa (PKAD).

“Sebelum ada PTPD, desa hanya berperan menjalankan roda administrasi dan birokrasi. Sekarang dengan bantuan dan pemantauan PTPD, desa bisa lebih fokus pada kinerja dan meningkatkan layanan bagi masyarakat,” kata Darmujiadi. Ia menambahkan, “Kami membantu desa mensinergikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dengan pelaksanaannya. Kami membantu pemerintah desa duduk Bersama dan membahas APB Desa, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa, dan laporan tahunan mereka. Kami juga memberikan dukungan pelatihan dan evaluasi untuk memastikan dana mereka sesuai prioritas dalam perencanaan desa.”

KOMPAK mengembangkan model asistensi teknis PTPD lewat kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari Strategi Nasional lebih luas tentang Penguatan Kapasitas Aparat Desa (PKAD).

Meski Kecamatan Panggul bukan wilayah kerja KOMPAK, pemerintah kecamatan di wilayah ini belajar dari keberhasilan kecamatan tetangganya dan bertekad untuk mempraktikkannya.

Agus Dwi Karyanto, Camat Panggul, menjelaskan, “Meski Panggul bukan daerah KOMPAK, kami sangat tertarik dengan kecamatan lain yang menerapkan PTPD dan kegiatan lain seperti SID [sistem informasi desa] dan pengembangan ekonomi lokal. Kami meminta bantuan KOMPAK agar bisa mengadopsi kegiatan-kegiatan ini. KOMPAK kemudian mengundang kami mengikuti pelatihan tentang PTPD dan lain-lain. Kini, sejak 2019, kami telah menjalankan PTPD dan berhasil mencapai berbagai kemajuan besar. Berkat PTPD, anggaran kami pun kini sejalan dengan pengeluaran!”

“Sebelum ada PTPD, desa hanya berperan menjalankan roda administrasi dan birokrasi. Sekarang dengan bantuan dan pemantauan PTPD, desa bisa lebih fokus pada kinerja dan meningkatkan layanan bagi masyarakat.” Darmujiadi, Fasilitator PTPD.

Empat dari 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek kini telah mengadopsi pendekatan PTPD. Pencapaian ini akan kian meluas di tahun-tahun mendatang karena Pemerintah Indonesia – lewat kemitraan dengan Bank Dunia dan didukung KOMPAK – akan menerapkan pendekatan serupa ke 350 kabupaten tambahan di seluruh Indonesia.

Memotong Birokrasi, Meningkatkan Kualitas Layanan



Afrida, Staf Keuangan Desa Bukit Tunyang, Bener Meriah sedang berkonsultasi dengan Fiqri Fauzan, anggota PTPD Bener Meriah, ▲ tentang Laporan Pemanfaatan Dana Desa Tahap I (Foto: KOMPAK)

Saukani, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Bener Meriah, masih ingat betul kerepotan yang terjadi saat memeriksa dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015. "Kami harus mengecek dokumen dari 232 desa. Imbasnya, dana desa baru bisa dicairkan di bulan September, dari yang seharusnya antara bulan Maret dan Juli."

Rudi Faisal, staf keuangan Gampong Sumber Jaya, memiliki pengalaman serupa Saukani. "Dulu kami harus bolak-balik berkonsultasi ke kabupaten, belum lagi jika ditemukan kesalahan dan perlu direvisi. Dokumen APBDes tidak bisa diselesaikan dalam satu hari, akibatnya dana desa terlambat dicairkan," tuturnya.

Angin perubahan kemudian datang pada tahun 2018 ketika Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyusun Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dengan difasilitasi oleh KOMPAK. Dengan peraturan ini, kecamatan memiliki kewenangan dan pendanaan yang lebih besar untuk membina dan mengawasi pemerintah desa.

Untuk memperkuat PTPD, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama dengan KOMPAK melaksanakan serangkaian pelatihan diantaranya pelatihan tentang tugas dan fungsi PTPD, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), pelaksanaan koordinasi kecamatan serta kesehatan dasar yang menjadi kewenangan desa.

Pelimpahan kewenangan ini diiringi dengan pembentukan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD). Anggota PTPD terdiri dari perangkat di tingkat kecamatan yang ditunjuk untuk memberikan bantuan teknis dalam mengelola pemerintahan desa, termasuk menjadi mitra pemerintah desa dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.

Untuk memperkuat PTPD, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama dengan KOMPAK melaksanakan serangkaian pelatihan diantaranya pelatihan tentang tugas dan fungsi PTPD, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), pelaksanaan koordinasi kecamatan serta kesehatan dasar yang menjadi kewenangan desa.

Subahrul, Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat DPMK Bener Meriah mengatakan bahwa pelimpahan kewenangan dan keberadaan PTPD ikut meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran desa.

“Sebelumnya pelaksanaan pembangunan desa terhambat karena anggaran belum turun, posyandu tidak bisa memberikan makanan tambahan dan vitamin. Beasiswa untuk siswa miskin berprestasi juga harus ditunda,” cerita Rudi

“Kini, kami nggak perlu lagi datang ke DPMK untuk berkonsultasi, cukup ke PTPD di kantor kecamatan saja. Tim PTPD akan mengecek ABPDes dan laporan lainnya terkait dana desa. Jika ada kesalahan, kami bisa langsung mengoreksinya dan dokumen sudah selesai dalam satu minggu,” papar Rudi.

Pada tahun 2019, Desa Sumber Jaya dan Desa Kulem Parakanis menjadi dua desa pertama yang mencairkan dana desa sesuai jadwal, yaitu Maret 2019.

Subahrul, Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat DPMK Bener Meriah mengatakan bahwa pelimpahan kewenangan dan keberadaan PTPD ikut meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran desa, “Pelimpahan kewenangan benar-benar mampu memangkas birokrasi serta mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kualitas layanan yang lebih baik bagi masyarakat.”

Mendorong Kepemimpinan Perempuan Lewat Akademi Paradigta



Sesi diskusi kelompok di salah satu kelas Akademi Paradigta di Kubu Raya (Foto: KOMPAK) ▲

“Awalnya saya tidak mau ikut Akademi Paradigta. Saya malu. Saya tidak lulus sekolah dasar. Tapi ibu-ibu dari PEKKA mendorong saya untuk ikut,” kenang Aminah (44), warga Desa Sungai Ambangan, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Aminah adalah satu dari 118 peserta angkatan pertama Akademi Paradigta yang diluncurkan di Kubu Raya tahun 2016. Selama kurang lebih satu tahun, ia dan perempuan lainnya dari berbagai desa di Kubu Raya belajar tentang tata kelola pemerintahan desa, peraturan dan anggaran desa, cara untuk dapat terlibat dalam pemerintahan desa dan mengadvokasi pemerintah desa dengan lebih efektif, serta mengenai kepemimpinan dan keterlibatan perempuan di desa.

“Dulu saya tidak tahu dana desa dipakai untuk apa saja. Sekarang saya bisa membaca dan memahami laporan pengeluaran keuangan desa. Karena saya tahu ke mana dana desa dialokasikan, kini saya punya kepercayaan diri untuk bisa mengatakan bagaimana kita harus memanfaatkan dana desa tersebut,” terang Aminah.



Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), didukung oleh KOMPAK, mendirikan Akademi Paradigta untuk membangun kapasitas kaum perempuan dan memperkuat kepemimpinan kaum perempuan di desa.

Akademi Paradigta telah dilaksanakan di 400 desa di 10 provinsi. Sebanyak 2.500 alumninya – yang terus bertambah – berhasil mendorong peningkatan alokasi pendanaan untuk layanan dasar sebesar lebih dari Rp1 miliar. Selain itu, mereka menginisiasi terbitnya 50 peraturan daerah yang berfokus pada masyarakat miskin serta pembangunan yang inklusif gender, termasuk meningkatkan batas usia minimum untuk menikah.

Koordinator PEKKA untuk Kalimantan Barat Kholilah masih ingat berbagai tantangan yang harus dihadapi di masa awal Akademi Paradigta. “Meyakinkan kepala desa untuk mengalokasikan dana desanya untuk pendidikan perempuan bukan hal yang mudah. Selain tidak adanya landasan

peraturan, penggunaan dana desa umumnya lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa.”

Akademi Paradigta telah dilaksanakan di 400 desa di 10 provinsi. Sebanyak 2.500 alumninya – yang terus bertambah – berhasil mendorong peningkatan alokasi pendanaan untuk layanan dasar sebesar lebih dari Rp1 miliar. ■

Namun akhirnya PEKKA berhasil mendapatkan dukungan desa untuk program ini. “Desa membiayai transportasi dan kebutuhan lain untuk para perempuan, sementara PEKKA membiayai mentor dan koordinator pendidikan,” jelas Kholilah. Dukungan juga ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya lewat peraturan bupati agar setiap desa mengalokasikan dana desa sebesar Rp15 juta untuk Akademi Paradigta.

Desa Limbung termasuk salah satu desa yang mengalokasikan

dana desanya untuk pendidikan perempuan. Kepala Desa Limbung Tajudin mengatakan, “Saya ingin warga desa ini maju. Saat mendengar PEKKA mengadakan sekolah untuk perempuan, saya langsung setuju mengirim perwakilan perempuan untuk belajar. Selama ini desa kami kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni.”

Sebagai kepala desa, Tajudin merasakan sekali manfaat keberadaan warga perempuan yang belajar tata kelola desa, perencanaan dan anggaran. Selain ide-ide segar yang didapatkan dalam pengelolaan desa, alumni Akademi Paradigta juga selalu siap jika desa membutuhkan bantuan mereka. Advokasi alumni juga mendorong Tajudin meningkatkan anggaran desa untuk kegiatan ini menjadi Rp20 juta per tahun di tahun 2019.

Kemauan Tajudin untuk memajukan kaum perempuan tak lepas dari dukungan Bupati Kubu Raya Muda Hendrawan. Muda menegaskan komitmennya agar warga perempuan di desa lain ikut serta di Akademi Paradigta. “Ada 118 desa di Kubu Raya, tapi baru 42 desa yang mengirim warganya ke Akademi Paradigta. Kami sedang berupaya agar semua desa bisa mengirim warganya ke Akademi Paradigta, sehingga desa-desa menerima manfaat lebih besar dari kontribusi kaum perempuan,” ujar Muda.

Penghargaan Inovasi Percepatan Layanan: Kompetisi Kecamatan Untuk Kemajuan Layanan Administrasi Kependudukan



Petugas Jek-Duk Kecamatan Petungkriyono (Foto: KOMPAK) ▲

Lima kecamatan di Kabupaten Pekalongan lolos ke babak final Kompetisi Inovasi Percepatan Layanan Kependudukan pada bulan November 2016, yakni Kecamatan Talun, Tirto, Kedungwuni, Karangdadap dan Petungkriyono. Diprakarsai KOMPAK dan diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan, kompetisi ini diadakan untuk mendorong aparat pemerintah di tingkat kecamatan untuk menyelenggarakan layanan identitas hukum dengan mudah dan cepat, terutama dalam memperoleh kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga, akta kelahiran serta akta kematian.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M.Arifin mengatakan, “Tanpa adanya identitas hukum, masyarakat tidak dapat mengakses pelayanan dasar. Misalnya Kecamatan Petungkriyono yang dikenal sebagai daerah yang ekonominya miskin juga terpencil dan sulit untuk diakses, sekarang dapat memaksimalkan dukungan dalam melayani warganya. Intervensi KOMPAK ini mendorong petugas administrasi kecamatan untuk melayani warga mereka dengan lebih baik,” tambah Arifin.



Terpilih lima finalis dari 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan melalui seleksi yang ketat. Pada putaran final Kompetisi Inovasi Percepatan Layanan Kependudukan, kecamatan finalis diwakili oleh masing-masing camatnya sebagai juru bicara. Penjurian dilakukan oleh perwakilan dari KOMPAK dan peneliti dari Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI). Kecamatan Talun kemudian memenangkan penghargaan atas program inovatif mereka dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk mewujudkan pelayanan identitas hukum yang lebih baik, Camat Talun Ajid Suryo Pratondo, membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelayanan Masyarakat (Satgas PPM) di wilayahnya. Ia bahkan menyediakan payung hukum bagi program tersebut dengan menerbitkan Surat

Keputusan Camat. "Satgas PPM ini dibentuk untuk membantu masyarakat memperoleh dokumen kependudukan dengan cepat, mudah dan murah. Kenapa murah? Karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang terletak di Kajen. Sebagai contoh, kecamatan terluar kami ada yang letaknya 33 kilometer dari Kajen, ibukota Kabupaten Pekalongan," kata Ajid.

Ia menambahkan bahwa anggota Satgas PPM akan membawakan dokumen kependudukan warga yang sedang diproses ke Dinas Dukcapil di Kajen dan setelah selesai akan diantar kembali untuk diserahkan kepada warga yang mengurus. "Petugas kamilah yang aktif. Jika masyarakat sendiri yang melakukannya, satu hari tidak akan cukup buat mereka untuk mengurusnya. Proses ini akan memakan biaya antara Rp100-150 ribu. Kalau diurus melalui Satgas PPM mereka tidak perlu membayar apa-apa," kata Ajid.

Kecamatan Petungkriyono keluar sebagai pemenang kedua. Camat Petungkriyono Agus Purwanto meluncurkan Ojek Kependudukan (Jek-Duk) pada tanggal 24 Oktober 2016. Jek-Duk melibatkan 25 petugas yang siap melayani masyarakat untuk memperoleh dokumen hukum. "Mereka

terdiri dari 16 PNS Pemerintah Kecamatan Petungkriyono dan sisanya adalah sekretaris desa. Petugas kami siap membantu masyarakat yang ingin memperoleh kartu keluarga, surat pindah, akta kelahiran dan akta kematian.

Petugas Jek-Duk akan mengambil formulir dari masyarakat dan mengatakannya ke kabupaten untuk kemudian diproses lebih lanjut di Dinas Dukcapil. Setelah selesai, dokumen akan diserahkan kepada warga yang mengajukannya. Proses tersebut lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah, mengingat daerah kami berada di wilayah pegunungan dengan jalan-jalan curam. Akan perlu waktu lama dan biaya yang cukup besar untuk pergi ke kantor kabupaten," ujarnya.

Dua di antara petugas Jek-Duk adalah perempuan yang selalu memakai jaket jingga saat melaksanakan tugas mereka. Dengan sepeda motor mereka mendatangi rumah-rumah penduduk di lereng dan lembah pegunungan. Sebagai tindak lanjut, KOMPAK akan mengintegrasikan inovasi ini dalam rekomendasi kebijakan yang akan diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

